

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anggaran Rumah DP 0 Persen Dipangkas

JAKARTA - Anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami pemangkasan di 2020.

Besarannya mencapai Rp500 miliar berdasarkan Rapat Badan Anggaran DKI Jakarta antara Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta.

Kondisi demikian akan membuat peminat program rumah tanpa uang muka atau DP 0 persen dipastikan antre lebih panjang.

Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, anggaran ini digunakan untuk fasilitas penyediaan kredit bagi warga yang mengajukan DP 0 Rupiah, salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kita sepakati jadi Rp500 miliar," ujar dia sambil mengetok palu di Sidang Banggar DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Prasetyo menjelaskan, kebijakan DP 0 Rupiah nanti akan digeser dengan memanfaatkan rumah susun (rusun) di Jakarta. Anggaran DP 0 Rupiah disepakati untuk dikurangi. "Kita maksimalin saja. Kan banyak rusun. Jadi kita prioritas untuk warga tinggal di rusun saja," ucap politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dia menuturkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta awalnya menganggarkan mata anggaran ini sebesar Rp2 triliun di Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPAS). Kemudian, anggaran ini kembali turun menjadi Rp1 triliun saat rapat dengan Badan Anggaran, kemarin.

Sore ini, lanjutnya, baik dari DKI dan DPRD DKI sama-sama kembali mengajukan efisiensi untuk anggaran pembiayaan ini. DKI mengajukan anggaran Rp500 miliar sementara DPRD DKI Jakarta mengajukan anggaran di 0 kan alias dipotong habis.

Dengan sejumlah pertimbangan dan naik turun anggaran di pos yang lain, akhirnya Dewan dan Pemprov DKI sepakat untuk berhenti pada angka Rp500 miliar.

Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menambahkan, anggaran pinjaman daerah masih relevan diberikan

"Pinjaman daerah itu tidak bisa di nol kan. Karena memang ada angka untuk kebutuhan perumahan yang harus diakui," kata Pandapotan.

Seperti diketahui, program rumah tanpa DP ini dikerjakan oleh PD Pembangunan Sarana Jaya. Targetnya, hunian yang terbangun sebanyak 13.500 unit dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta 2018-2023.

Adapun jumlah harga rumah yang ditawarkan sangat beragam mulai dari Rp180 juta hingga Rp310 juta. Masyarakat diperbolehkan untuk mencicil dengan dana talangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank DKI dengan tenor maksimal 20 tahun. (aen)



Kan banyak rusun. Jadi kita prioritas untuk warga tinggal di rusun saja".

Prasetyo Edi Marsudi
Ketua DPRD DKI Jakarta